

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini permasalahan yang dihadapi oleh negara semakin kompleks. Mulai dari masalah ekonomi, politik, keamanan, kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Diantara isu-isu yang dihadapi oleh negara-negara di dunia tersebut, isu ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Sebab, Masalah ekonomi tidak terbatas pada pertukaran barang dan jasa akan tetapi menyangkut transaksi ekonomi antara satu negara dengan negara lainnya

Semakin bertambahnya kebutuhan suatu negara, hampir tidak satupun negara mampu memenuhi sendiri kebutuhannya. Sehingga hal yang lazim disaksikan adalah adanya kerjasama antar negara baik dengan negara tetangga, negara dalam satu kawasan maupun negara yang ada di kawasan lainnya. Misalnya kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam berbagai bidang. Hal ini dilakukan tentunya untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Hubungan antara Indonesia dan Australia mempunyai sejarah yang panjang. Dalam beberapa literatur sejarah dijelaskan bahwa para nelayan Bugis dan Makasar secara teratur berlayar ke perairan Australia sebelah utara setidaknya sejak tahun 1650. Pelayaran ini dimulai pada masa Kerajaan Gowa di Makasar tahun 1950an. Para pelaut Makassar dan Bugis ini menyebut Tanah Arnhem dengan sebutan *Marege* dan bagian

daerah barat laut Australia mereka sebut *Kayu Jawa*. Para pelaut yang datang ke Australia tersebut bertujuan untuk mencari ikan yang akan dibawa pulang ke Indonesia kemudian dijual kembali maupun diekspor ke negara lain. Orang-orang Aborijin pun banyak yang bekerja dan ikut berlayar bersama nelayan tradisional Indonesia pada saat itu. Mereka juga mempelajari dan mengikuti beberapa kebiasaan nelayan tradisional Indonesia tersebut. Misalnya, cara mengisap tembakau dan menggambar perahu. hingga saat ini masih banyak nelayan tradisional Indonesia yang mencari ikan disekitar perairan Australia.¹

Hubungan negara bertetangga Indonesia dan Australia mengalami pasang surut. Hal ini dipicu oleh berbagai masalah seperti masalah Timor Timur pada 1999, peristiwa Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 dan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap beberapa pejabat tinggi Indonesia yang membuat hubungan bilateral Indonesia-Australia terganggu. Di sisi lain, berbagai bentuk kerja sama ekonomi, keamanan, pariwisata dan sebagainya menguatkan hubungan bilateral kedua negara.²

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang penting bagi Australia. sebab secara geografis kedua negara tersebut berdekatan. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan penting dalam ASEAN sehingga dapat menjembatani hubungan perdagangan

¹ Anonim, 1997, *Geografi Australia*, Lembaga Penerbit Indonesia Australia, jakarta, hal 175-177

² Richard Chauvel dkk, 2005, *Indonesia -Australia Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*, Granit, Jakarta, hal. 6-12

Australia dengan negara-negara Anggota ASEAN. Meskipun Indonesia hanya berada pada tingkat ke-11 mitra dagang Australia, Indonesia adalah negara ASEAN terbesar dari segi jumlah populasi dan luas wilayah sehingga dapat menjadi pangsa pasar yang besar bagi Australia.³

Australia memberikan bantuan dalam bidang pendidikan kepada Indonesia dengan jumlah yang cukup besar. Setiap tahun pemerintah Australia memberikan bantuan kepada lebih dari 250-300 mahasiswa Indonesia yang akan melanjutkan studi ke jenjang S2 dan S3 di Australia. bahkan Australia telah membantu berbagai pembangunan infrastruktur pendidikan di beberapa wilayah di Indonesia.

Cerminan pentingnya Indonesia bagi Australia salah satunya tergambar dalam buku putih urusan luar negeri dan pertahanan tahun 1997. Buku tersebut menegaskan bahwa hubungan Indonesia Australia selalu penting. Posisi strategis Indonesia menjembatani rute perdagangan Australia dengan negara-negara ASEAN. Populasi dan posisi Indonesia di Asia Tenggara menyebabkan pembangunan kemitraan bilateralnya patut untuk diperhitungkan. Kerja sama telah berkembang baik dalam bidang ekonomi, teknis, pendidikan dan budaya yang luas.⁴

Indonesia dan Australia sepakat untuk membuka lebar hubungan kerja sama bilateral kedua negara, baik dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan pembangunan. Dengan terbentuknya *Free Trade*

³ Bambang Cipto, 2010, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 192.

⁴ Richard Chauvel, *op cit.*, hal. 6

Agreement (FTA) antara ASEAN dengan Australia dan New Zealand menjadikan landasan bagi peningkatan dan penajaman hubungan bilateral perdagangan antara Indonesia dan Australia dalam kerangka FTA bilateral. Dengan adanya FTA bilateral Indonesia-Australia meningkatkan peluang kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara, baik melalui peningkatan proyek kerja sama ekonomi maupun untuk membuka pasar potensial kedua negara. Keberadaan FTA bilateral Indonesia dan Australia diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral mengingat komplementaritas kedua negara dan jarak yang berdekatan. Selain itu, pada tahun 2010 Australia dan Indonesia juga menyetujui kerjasama *Economic Partnership agreement*.⁵

Salah satu bentuk kerjasama ekonomi Indonesia dan Australia adalah kerjasama Australia-Indonesia dalam bidang ekspor impor daging sapi. Kerjasama ekspor impor daging sapi ini penting karena penyediaan daging sapi secara nasional di Indonesia dibandingkan dengan jumlah permintaan daging sapi dalam negeri masih sangat jauh dari harapan. Sehingga salah satu jalan terbaik yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah dengan membeli daging sapi dari luar negeri yakni sapi Australia.

Indonesia belum mandiri dalam penyediaan kebutuhan daging sapi nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia baru mampu memproduksi 70%

⁵ Anonim, 2010, Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Bilateral Indonesia – Australia Dalam Kerangka *Economic Partnership*, *Buletin Kerjasama Perdagangan Internasional*, Jakarta, Edisi 3, hal. 14-15.

dari kebutuhan daging sapi nasional dimana 30% kebutuhan lainnya dipenuhi melalui impor. Berdasarkan data Pusdatin tahun 2012 Australia merupakan sumber dari 90,06% impor sapi hidup dan 46,70% impor daging sapi dan jeroan. Selandia Baru merupakan sumber impor 32,52 % daging sapi dan jeroan.⁶

Indonesia menjadikan Australia sebagai sumber impor ternak sapi dan daging sapi yang jumlahnya cukup besar. Besarnya impor ini dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan kesejahteraan dan pertambahan penduduk. Selain itu, juga dipengaruhi oleh meningkatnya kepedulian penduduk akan pentingnya kebutuhan protein hewani.

Saat ini sistem impor sapi Indonesia menggunakan sistem *country based*, yang artinya impor hanya bisa dilakukan dari suatu negara. Daging sapi impor harus didatangkan dari negara yang terbebas seluruhnya dari penyakit mulut dan kuku. Berdasarkan system tersebut, negara yang dipilih salah satunya adalah Australia.

Indonesia merupakan negara pengimpor terbesar sapi hidup Australia. Sepanjang 2008 sebanyak 651.196 ekor atau 75 persen dari 869.545 ekor ekspor sapi hidup Australia yang dijual ke pasar dunia di ekspor ke Indonesia. Impor Indonesia sepanjang 2008 itu naik 26 persen dari impornya pada tahun 2007 yang mencapai 516.992 ekor. Total nilai impor Indonesia itu mencapai 419 juta dolar Australia. Untuk itu, *Meat & Livestocks Australia* (MLA), perusahaan yang menjadi mitra

⁶ Chalib Thalib dan Yudi Guntara Noor, 2008, Penyediaan Daging Sapi Nasional Dalam Ketahanan Pangan Indonesia, *Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan*, bogor, hal. 45

industri peternakan dan pemerintah Australia ini, menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara tujuan ekspor dan mitra dagang yang penting.⁷

Meat Live Stock Australia pada tahun 2011 menyebutkan bahwa pada akhir tahun 2010, Indonesia telah mengimpor 520.987 ekor sapi bakalan dari Australia. Hal ini menurun sekitar 33 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 772.000 ekor. Penurunan jumlah impor sapi tersebut seiring dengan pencapai target swasembada daging sapi tahun 2014.⁸ Ada beberapa negara selain Australia dan Selandia Baru yang bisa menjadi mitra Indonesia dalam ekspor-impor sapi. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Indonesia menganut system *Country Based* bukan *Zona Based* yang artinya harus impor daging dan sapi hidup dari negara-negara yang telah bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dikutip dari *World Organisation for Animal Health (OIE)* setidaknya ada 66 negara termasuk Indonesia dan Australia yang memberlakukan aturan *country based* atau bebas dari PMK.

Salah satu alasan khusus memilih Australia sebagai negara pemasok sapi karena jarak kedua negara itu sangat dekat dengan Indonesia. Faktor lain yang diperhitungkan seperti lamanya perjalanan, jumlah pasokan sapi dan aspek kehalalan khusus untuk daging sapi beku.

⁷ Puskesmaveta, Indonesia Importir Terbesar Importir Hidup Australia, <http://www.vet-indo.com/2009/02/indonesia-importir-terbesar-sapi-hidup-australia/>, Diakses pada hari sabtu tanggal 16 januari 2016 pukul 20.00 WIB.

⁸ Atien Priyanti, IGAP Mahendri, dan Uka Kusnadi, 2011, *Dinamika Produksi Daging Sapi di Wilayah Sentra Usaha Sapi Potong Indonesia*, *Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan*, bogor, hal.574.

Impor sapi hidup selama ini dipandang tidak ekonomis mengimpor dari negara-negara lain (selain Australia dan Selandia Baru) karena biaya transportasi yang mahal dan lamanya perjalanan. Di samping itu kapasitas pasokan sapi negara lain juga terbatas.⁹ Sebenarnya Brazil dan India merupakan negara yang juga memiliki pasokan sapi yang besar dan harga yang lebih murah dari pada sapi Australia namun kedua negara tersebut tidak termasuk dalam daftar negara-negara *Country Based*.

Impor sapi Australia ke Indonesia mengalami kondisi yang fluktuatif dari masa ke masa. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan daging sapi nasional sampai saat ini belum dapat terpenuhi sehingga masih harus ditutupi dengan keberadaan sapi impor baik dalam bentuk sapi bakalan maupun daging sapi beku. Sebab saat ini jika hanya mengandalkan daging sapi dari peternak lokal maka yang dihadapi adalah semakin tinggi dan langkanya daging sapi karena ketersediaan masih kurang dibandingkan tingginya permintaan daging sapi.

Berdasarkan latar belakang di atas, menimbulkan ketertarikan penulis untuk meneliti mengenai **“Tinjauan Yuridis Kerjasama Australia-Indonesia Dalam Bidang Ekspor Impor Daging Sapi”**.

⁹ Dinas Peternakan Jawa barat. Selain Australia dan Selandia Baru, RI bisa impor sapi dari 63 Negara.<http://disnak.jabarprov.go.id/index.php/subblog/read/2013/2517/Selain-Australia-danSelandia-Baru-RI-Bisa-Impor-Sapi-dari-63-Negara-Ini/2532> diakses pada hari minggu tanggal 17 jnuari 2016 pukul 21.30 WIB.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memberikan batasan pada kerjasama Australia-Indonesia dalam bidang ekspor impor daging sapi pada tahun 2010-2015. Batasan tahun ini digunakan karena penulis ingin menjelaskan mengenai kebijakan sewasembada daging 2010 dan 2014 dan kaitannya dengan impor daging sapi Australia hingga saat ini.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Indonesia dalam bidang impor daging sapi?
2. Bagaimana cara pemerintah republik Indonesia dalam mengurangi impor daging sapi?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti pada umumnya dilakukan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan cara-cara atau metode ilmiah.

Setiap usaha yang dilakukan oleh manusia tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula penelitian hendak yang dilakukan oleh penulis.

Adapun tujuan yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kebijakan Indonesia dalam bidang impor daging sapi.
2. Bagaimana cara pemerintah republik Indonesia dalam mengurangi impor daging sapi.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan di atas dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai *EKSPOR IMPOR DAGING SAPI* yang dilakukan oleh Australia-Indonesia.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis yakni menambah wawasan bagi peneliti khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

E. Kerangka Teori

Dalam mengkaji hubungan kerjasama perdagangan daging sapi Indonesia dan Australia tentunya dibutuhkan konsep dan teori untuk menganalisis. Salah satu teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori kerjasama internasional. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa hampir semua negara tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri sehingga perlu bekerja sama dengan negara lain.

Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa: “Kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi bertambah

kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat Internasional”.¹⁰ Kerjasama dalam konteks hubungan internasional terbagi menjadi kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama antara dua negara dalam bidang-bidang tertentu. Kerjasama bilateral antara dua negara juga mempunyai prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain dalam langkah pengambilan kebijakan di negaranya masing-masing. Sedangkan kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara atau beberapa negara. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia merupakan salah satu bentuk hubungan bilateral.

Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa ; “Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua Negara”.¹¹ Sedangkan Juwondo mendefinisikan hubungan bilateral sebagai berikut :

Hubungan bilateral sebagai hubungan interaksi antar dua negara yang dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak-hak kedua negara untuk melakukan berbagai kerjasama pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan atau mengucilkan keberadaan negara tersebut serta menunjukkan dan memberikan nilai tambahan yang menguntungkan dari hubungan bilateral itu.¹²

¹⁰ Koesnadi Kartasasmita, 1977, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Bandung, hal. 19

¹¹ Didi Krisna, 1993, *Kamus Politik Internasional*, Grasindo, Jakarta, hal. 18

¹² Fatma Septya, 2013, *Kerjasama Ekonomi Indonesia-Brazil*, *jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin*, Makassar, hal. 8

Hubungan bilateral memiliki beberapa kelebihan antara lain kerjasama ini cenderung mudah dilakukan karena negara yang terlibat hanya 2 (dua) dan aturan tidak begitu kompleks. Hasil dari kerjasama bilateral pada umumnya menghasilkan sebuah transaksi yang berulang-ulang melalui aktifitas perdagangan dan investasi.¹³

Kerjasama Indonesia Australia dalam bidang perdagangan khususnya impor daging sapi ke Indonesia merupakan salah satu bentuk perdagangan internasional. Secara umum, perdagangan internasional merupakan pertukaran barang atau jasa yang melintasi batas negara. Dalam perdagangan internasional dikenal beberapa teori diantaranya teori keunggulan absolute Adam Smith dan teori keunggulan komparatif David Ricardo.

Menurut teori keunggulan Absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith bahwa “Suatu negara akan melakukan perdagangan jika kedua negara tersebut memperoleh keuntungan”.¹⁴ Adam Smith juga mengemukakan bahwa :

*It was impossible for all nations to become rich simultaneously by following mercantilist prescriptions because the export of one nation is another nation's import. However, all nations would gain simultaneously if they practiced free trade and specialized in accordance with their absolute advantage.*¹⁵

Selain itu, Adam Smith juga mengemukakan bahwa.¹⁶ Menurut Smith suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih

¹³ *Ibid*, hal 9

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Anonim, 2009, Absolute And Comparative Advantage, *International Encyclopedia Of The Social Sciences 2nd Edition*, hal. 1

¹⁶ Reinhard Schumacher, 2012, Adam Smith's Theory of Absolute advantage and the Use of Doxography in the History of Economics, *Erasmus Journal for Philosophy and Economics*, hal. 62

murah dari pada negara lain, yaitu karena memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang tersebut. Adapun keunggulan mutlak menurut Adam Smith merupakan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang dan jasa per unit dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibanding kemampuan negara-negara lain.

Teori keunggulan Komparatif menurut David Ricardo bahwa sekalipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi dua jenis komoditas jika dibandingkan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih bisa berlangsung, selama rasio harga antar negara masih berbeda jika dibandingkan tidak ada perdagangan.¹⁷ Keunggulan komparatif hanya bisa terjadi jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih efisien daripada orang lain. Suatu negara cenderung untuk mengeskpor barang barang yang mereka produksi secara efisien dan mengimpor untuk barang yang mereka tidak bisa produksi secara efisien.

Selanjutnya, teori Heckscher Ohlin tentang pola perdagangan menyatakan bahwa :

Komoditas-komoditas yang dalam produksinya memerlukan faktor produksi (yang melimpah) dan faktor produksi (yang langka) di ekspor untuk ditukar dengan barang -barang yang membutuhkan faktor produksi dalam proporsi yang sebaliknya. Jadi secara tidak langsung faktor produksi yang melimpah di ekspor dan faktor yang langka di impor.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hal. 2

¹⁸ Saptana, Sumaryanto dan Supena Friyatno, 2012, “analisis keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas kentang dan kubis di wonosobo jawa tengah”, *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian*, Bogor, hal.3

Ekspor merupakan bagian penting dalam perdagangan internasional. Ekspor dapat diartikan sebagai total penjualan barang yang dapat dihasilkan oleh suatu negara, kemudian diperdagangkan kepada negara lain dengan tujuan mendapatkan devisa. Suatu negara dapat mengekspor barang-barang yang dihasilkannya ke negara lain yang tidak menghasilkan barang-barang yang dihasilkan negara pengekspor.¹⁹

Menurut Undang-Undang kepabeanan Nomor 17 tahun 2006, yang dimaksud dengan ekspor adalah “mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean, sedangkan impor adalah memasukkan barang dari luar ke dalam wilayah pabean”.²⁰ Dalam transaksi perdagangan ekspor, seorang eksportir banyak berhubungan dengan berbagai instansi/lembaga yang menunjang terlaksananya transaksi ekspor.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif digunakan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan Indonesia dengan Australia dalam bidang impor daging sapi. Setelah itu, penulis akan menggunakan penelitian analitik untuk menjelaskan Bagaimana cara pemerintah republik Indonesia dalam mengurangi impor daging sapi

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara pengumpulan data

¹⁹ Roselyne Hutabarat, 1989, *Transaksi Ekspor Impor*, Erlangga, 1989, edisi kedua, hal. 2

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berasal dari buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, artikel dan sebagainya.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah pengambilan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, internet, maupun buletin yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti yakni mengenai kerjasama Indonesia-Australia dalam bidang Impor daging sapi. Beberapa data yang akan digunakan di antaranya :

- a. Bahan hukum primer, yaitu meliputi:
 1. Norma dasar Pancasila.
 2. Peraturan perundang-undangan.
 3. WTO (world trade organization)
 4. Konvensi
 5. Peraturan menteri
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi:
 1. karya-karya ilmiah yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.
 2. hasil-hasil dari suatu penelitian.
 3. media masa.
 4. Internet
 5. Perjanjian perdagangan Indonesia dan Australia

6. Data ekspor impor Indonesia dan Indonesia
 7. Kebijakan Pemerintah Australia dalam bidang perdagangan Internasional.
 8. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam bidang perdagangan Internasional.
- c. Bahan hukum tertier, misalnya bibliografi, kamus yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan lain lain.

4. Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif artinya penulis berusaha menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari beberapa sumber yang menggambarkan bentuk kerjasama Indonesia dan Australia dalam bidang impor daging sapi melalui data yang didapatkan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tinjauan umum yang menjelaskan pengertian ekspor – impor, hubungan bilateral Indonesia – Australia, kerjasama perdagangan Indonesia – Australia.

Bab III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang rumusan masalah yaitu kebijakan Indonesia dalam bidang impor daging sapi, dan Bagaimana cara pemerintah republik Indonesia dalam mengurangi impor daging sapi.

Bab IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis.